



Dukungan Instrumen De-Risking yang dimiliki Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Jakarta, 16 September 2025



Asta Cita

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;**
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.



Paris Agreement dan NDC Indonesia



Penyampaian Nationally Determined Contribution (NDC) kepada UNFCCC

Melalui NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK dari level BaU pada tahun 2030 sebesar:

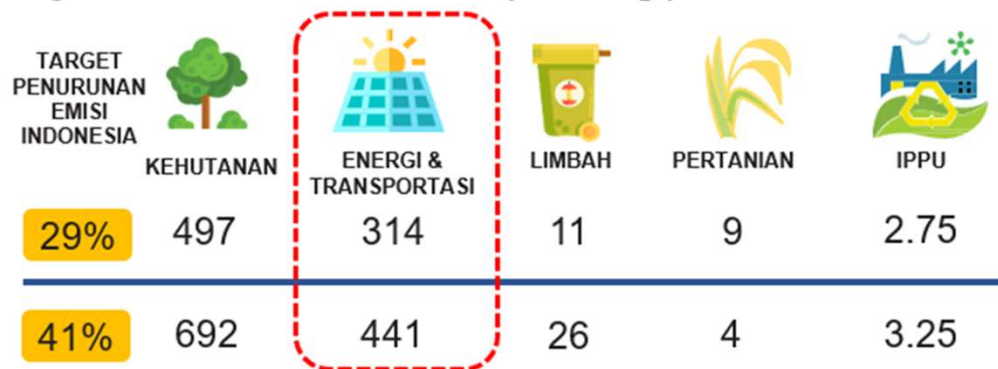
29% melalui upaya nasional
dan
41% dengan dukungan internasional

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement ke dalam UU No. 16/2016

Estimasi Biaya Mitigasi Perubahan Iklim

Referensi	Ruang Lingkup	Estimasi Biaya/Dampak
Second Biennial Update Report, KLHK (2018)	Biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC	Biaya mitigasi akumulatif mencapai Rp3.461 triliun hingga tahun 2030
Roadmap NDC Mitigasi Indonesia, KLHK (2020)	Biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC (menggunakan pendekatan biaya aksi mitigasi)	Biaya mitigasi akumulatif dari tahun 2020-2030 mencapai Rp3.779 triliun (Rp343,6 triliun per tahun)

Target Penurunan Emisi Per Sektor (MTon CO₂e)



Sumber: Updated NDC (2021)

Kebutuhan Pembiayaan Mitigasi Perubahan Iklim per Sektor

Sektor	Second Biennial Update Report (Rp triliun)	Roadmap NDC Mitigasi (Rp triliun)
Kehutanan	77,82	93,28
Energi dan Transportasi	3.307,20	3.500,00
IPPU	40,77	0,92
Limbah	30,34	181,40
Pertanian	5,18	4,04
Total	3.461,31	3.779,63

Sumber: Second Biennial Update Report (2018) & Roadmap NDC Mitigasi (2020)



Dukungan Fiskal Pemerintah- Penjaminan



Tujuan

- meningkatkan kelayakan kredit (*credit enhancement*) bagi pihak terjamin;
- menurunkan biaya pendanaan proyek;
- mendapatkan term pembiayaan yang sesuai dengan tingkat pengembalian proyek infrastruktur yang umumnya membutuhkan waktu yang panjang;
- meningkatkan *bankability* proyek infrastruktur;
- mendorong keikutsertaan pihak swasta yang lebih luas dalam pembangunan proyek-proyek strategis nasional;
- memberikan kepastian keamanan dana yang diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur;

Penjaminan Infrastruktur

Penugasan BUMN

- ❑ Penugasan BUMN hanya diberikan apabila terdapat Perpres Penugasan (bersifat mandatory).
- ❑ Penugasan BUMN hanya dapat diberikan kepada BUMN 100% milik Pemerintah dan tidak dapat diberikan kepada anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terbuka.
- ❑ Jaminan Pemerintah diberikan untuk pinjaman BUMN yang mendapat penugasan.
- ❑ Contoh penugasan: PT PLN FTP-1 & 2, PIK, PT HK JTTS, PT KAI LRT-KCJB, PT RNI

Direct Lending BUMN

- ❑ Diberikan kepada BUMN untuk pembiayaan Proyek Infrastruktur yang layak secara ekonomi dan keuangan (termasuk aspek teknis, amdal, dan sosial);
- ❑ Memberikan akses pendanaan murah dan bertenor panjang (setara *sovereign debt*) bagi BUMN.
- ❑ Contoh: *Direct Lending* di bidang kelistrikan, *renewable energy*, dan pariwisata.

KPBU

- ❑ Penjaminan diberikan atas kewajiban finansial Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (PJPK) kepada Badan Usaha;
- ❑ Penjaminan diberikan dalam rangka meningkatkan *bankability* proyek KPBU;
- ❑ Contoh: SPAM Semarang Barat, Jalan Lintas Timur Sumatera di Sumatera Selatan dan Riau

Penjaminan Lainnya

- ❑ Penjaminan diberikan dalam rangka investasi dan penjaminan kredit, antara lain:
 - Penjaminan untuk percepatan penyediaan air minum;
 - Percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional;
 - Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN (PT SMI)

Program PEN*)

- ❑ Diberikan dalam bentuk Penjaminan Kredit kepada UMKM, Korporasi, dan BUMN yang terdampak COVID-19 dan/atau mendapatkan penugasan Pemerintah dalam rangka PEN.
- ❑ Penjaminan diberikan dalam rangka membantu pelaku usaha (UMKM, Korporasi, dan BUMN) untuk mendapatkan akses pendanaan dari perbankan maupun dari pasar modal, dengan *cost of fund* yang lebih rendah untuk melanjutkan operasional perusahaan
- ❑ Contoh: Program Penjaminan Kredit UMKM Non-KUR.

*) Pemberian penjaminan untuk program PEN telah berakhir pada tahun 2022, namun masih terdapat *outstanding* sampai dengan tahun 2029



Dukungan Fiskal Pemerintah untuk Mendukung Pengembangan Energi Terbarukan dan Transisi Energi



Penjaminan Pemerintah
atas Penugasan kepada
PT PLN
(FTP-1, FTP-2, PIK)



Penjaminan Pemerintah
atas Pinjaman Langsung
BUMN dari Lembaga
Keuangan Internasional
(Direct Lending)



Penjaminan
Pengembangan Energi
Terbarukan



Dukungan untuk
Pengembangan Energi
Panas Bumi



Penjaminan Pemerintah atas Penugasan kepada PT PLN (Persero)



PLN

Program 10.000 MW Tahap I / FTP I

- **Bentuk Jaminan** : Penjaminan Kredit
Penjaminan terhadap keseluruhan kewajiban pembayaran PT PLN jika default
- **Dasar Hukum** : Perpres No. 91/2007 and Peraturan Menteri Keuangan No. 44/2008
- Pemerintah telah menerbitkan 36 Surat Jaminan

Program 10.000 MW Tahap II / FTP II

- **Bentuk Jaminan** : Penjaminan Kelayakan Usaha
Penjaminan dalam rangka memastikan kemampuan PT PLN untuk memenuhi kewajiban finansialnya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Pembangkit Listrik
- **Dasar Hukum**: Perpres 4 /2010 jo. Perpres No. 194 Tahun 2014 , PMK No. 173/2014
- Pemerintah telah menerbitkan 10 Surat Jaminan Kelayakan Usaha

Program 35.000 MW / PIK

- **Bentuk Jaminan** : Penjaminan Kredit dan Kelayakan Usaha
Penjaminan terhadap keseluruhan kewajiban pembayaran PT PLN jika default dan penjaminan kelayakan usaha PLN dalam membayar kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Listrik kepada Pengembang Swasta, dan menjamin risiko politik
- **Dasar Hukum**: Perpres 4 /2016 jo. Perpres No. 14/2017, Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2016 jo. 135/2019
- Pemerintah telah menerbitkan telah menerbitkan 3 Surat Jaminan Kelayakan Usaha dan 4 Surat Jaminan Kredit atas Pinjaman PT PLN



Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung BUMN dari Lembaga Keuangan Internasional (*Direct Lending*)



Penjaminan Pemerintah atas Direct Lending BUMN

TUJUAN

1. Guna memenuhi syarat LKI dalam memperoleh pendanaan murah dan bertenor Panjang (setara *sovereign debt*) bagi BUMN dalam membangun proyek infrastruktur; dan
2. Menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek.

Dasar Hukum

1. **Perpres 82/2015** tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara.
2. **Peraturan Menteri Keuangan No. 189/2015** tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara.
3. **Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 101/PMK.08/2018** tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari BUMN yang melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur

Ruang Lingkup

1. Pinjaman Langsung Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara dari LKI yang akan diteruskan kepada BUMN lainnya yang digunakan untuk Penyediaan Infrastruktur
2. Pemerintah telah menerbitkan 12 surat jaminan (PLN, Geodipa, ITDC)



Penjaminan Pemerintah atas Direct Lending BUMN



Sejak 2015 melalui Perpres 82/2015 Gol memberikan dukungan atas pinjaman langsung BUMN ke LKI

Jaminan Pemerintah

Pemerintah memberikan jaminan ke BUMN untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman dari LKI tanpa melalui proses penganggaran APBN.

Bertujuan untuk memberikan akses kepada BUMN atas **pembiayaan konsesional dengan tenor lebih panjang (setara *sovereign debt*)** dalam rangka pembangunan infrastruktur nasional.

Jaminan Pemerintah memberikan manfaat finansial bagi BUMN namun Pemerintah terekspos risiko gagal bayar BUMN. Oleh karenanya Pemerintah menetapkan kriteria dan mengelola risiko atas penjaminan ini.



Skema Penjaminan Pemerintah atas Direct Lending BUMN (2018 - sekarang)



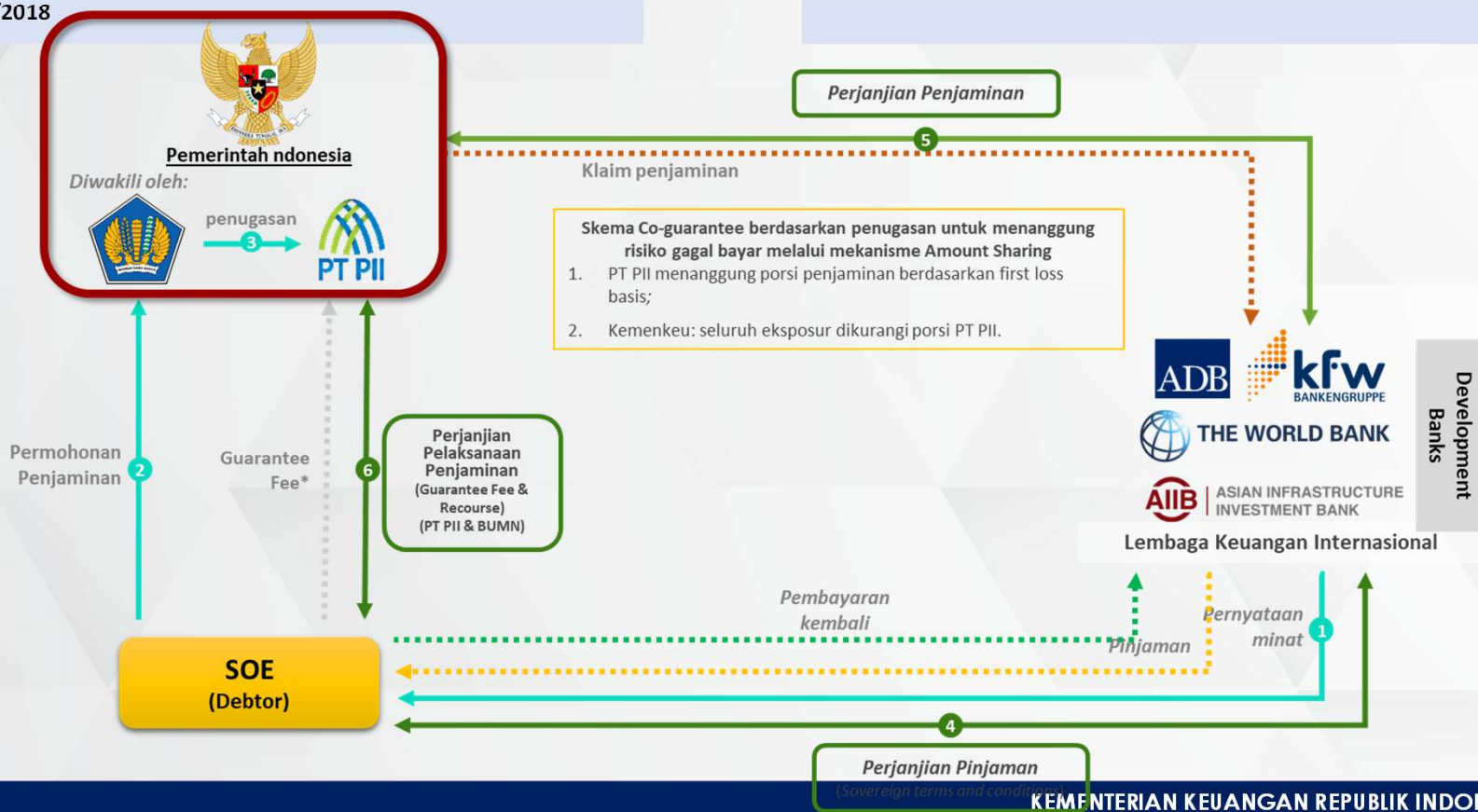
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penjaminan pemerintah atas Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN

- Perpres 82/2015
- PMK 189/2015
- PMK 101/2018

Penjaminan untuk Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

- Perpres 112/2022
- PMK 5/2025





Direct Lending Guarantee Portfolio

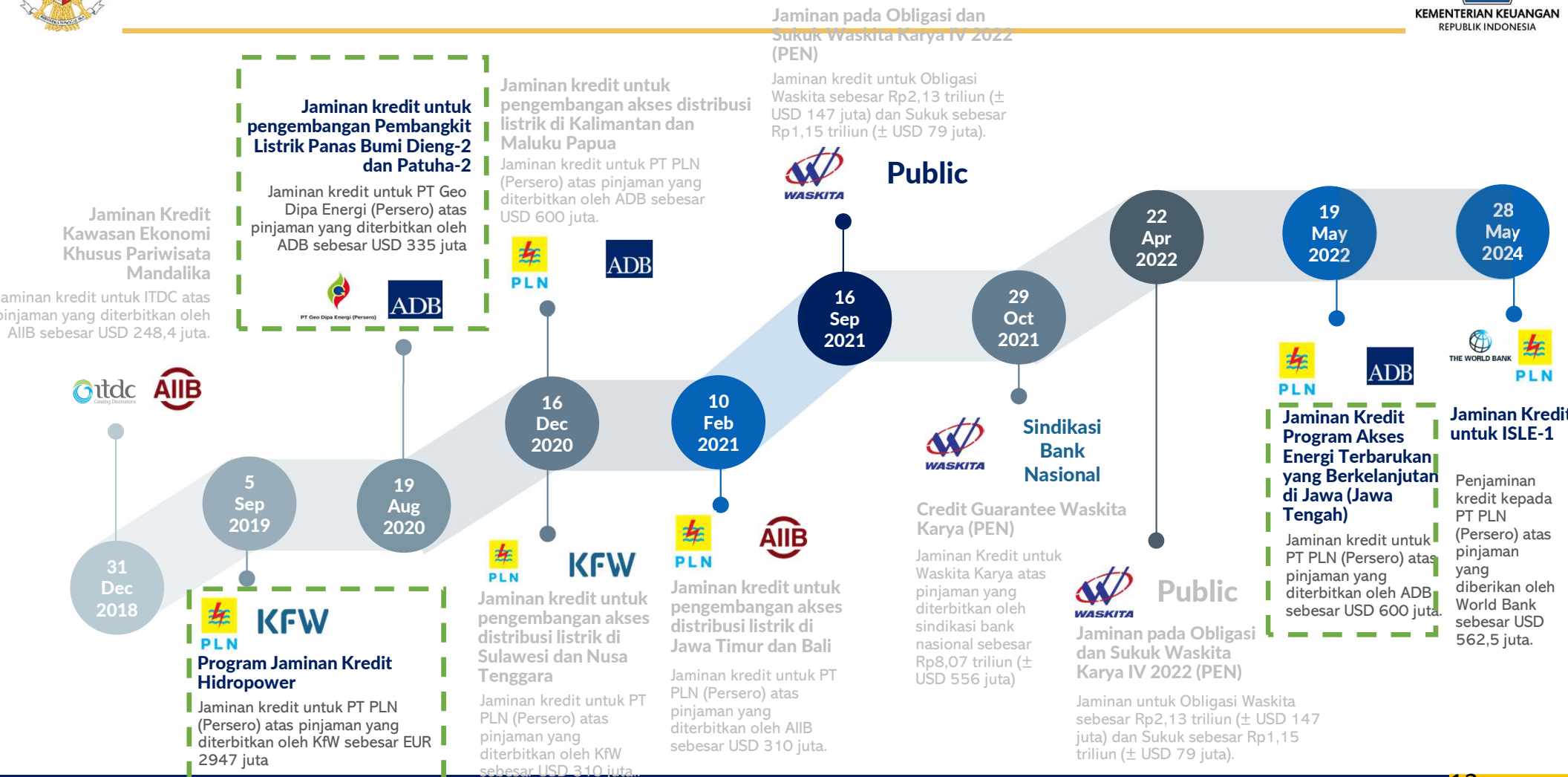


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Project Name	SOE	Lender	Signing Date	Guaranteed Loan	MoF Portion	IIGF Portion	Tenor (Year)
1	Electricity Grid Strengthening Sumatera Program - Results Based Lending	PT PLN	ADB & AIF	04-Dec-15	USD 36.277.710	USD 36.277.710	USD 0	20
				04-Dec-15	EUR 489.881.140	EUR 489.881.140	EUR 0	20
				04-Dec-15	USD 25.000.000	USD 25.000.000	USD 0	20
2	Power Distribution Development Program	PT PLN	World Bank	23-May-16	USD 500.000.000	USD 500.000.000	USD 0	20
3	Power Grid Enhancement Project	PT PLN	IsDB	11-Apr-17	USD 330.000.000	USD 330.000.000	USD 0	15
4	Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia - Electricity Grid Development Program	PT PLN	ADB	16-Nov-17	USD 600.000.000	USD 600.000.000	USD 0	20
5	Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project	ITDC	AIIB	31-Dec-18	USD 248.400.000	USD 209.900.000	USD 38.500.000	35
6	Hydropower Programme	PT PLN	KfW	05-Sep-19	EUR 294.700.000	EUR 252.600.000	EUR 42.100.000	15
7	Geothermal Power Generation Project - Ordinary OP and CTF	PT GDE	ADB	19-Aug-20	USD 335.000.000	USD 276.400.000	USD 58.600.000	20
8	Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia - Sulawesi and Nusa Tenggara Electricity Grid Development Programme	PT PLN	KfW	16-Dec-20	EUR 255.165.034	EUR 206.565.034	EUR 48.600.000	15
9	Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia - Electricity Grid Development Program Phase 2	PT PLN	ADB	08-Dec-20	USD 600.000.000	USD 495.000.000	USD 105.000.000	20
10	East Java & Bali Power Distribution	PT PLN	AIIB	10-Feb-21	USD 310.000.000	USD 248.000.000	USD 62.000.000	15
11	SREAP Western and Central Java	PT PLN	ADB	19-May-22	USD 600.000.000	USD 450.000.000	USD 150.000.000	20
12	Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Program for Result (ISLE-1 PFR)	PT PLN	World Bank	28 May 2024	USD 562.500.000	USD 416.780.000	USD 146.720.000	8-15



Penjaminan Bersama (Co-guarantee) Pemerintah dan PT PII





Penjaminan Pengembangan Energi Terbarukan



CREATIVE FINANCING FOR RENEWABLE ENERGY

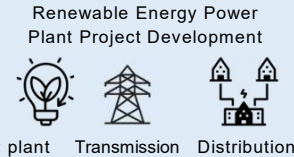
Government support the development of Renewable Energy power plant and the implementation of Energy Transition in the electricity sector with Minister of Finance Regulation No. 5 of 2025 with providing fiscal instrument Government Guarantee

To support...

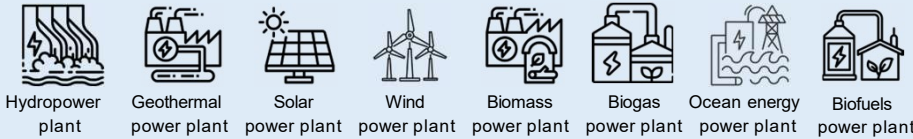
Energy Transition



Acceleration of the Termination of Coal-Fired Power Plants owned by PLN and IPP



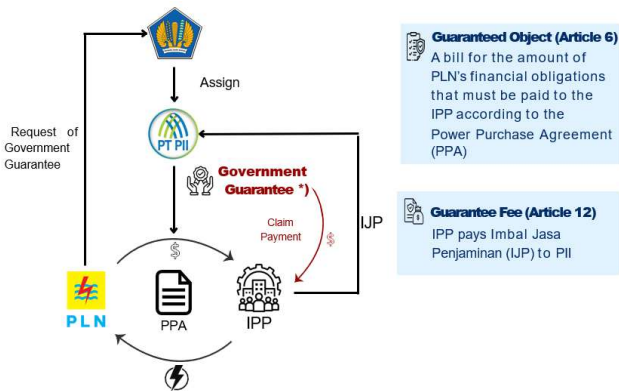
Renewable Energy*



*Based on Presidential Regulation No. 112 of 2022

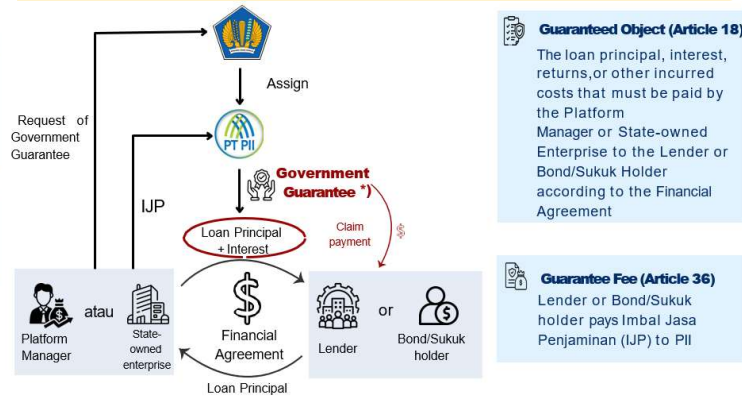
A. Power Purchase Agreement (PPA)

Government Guarantee for PT PLN Power Purchase Agreement (PPA) with IPP;



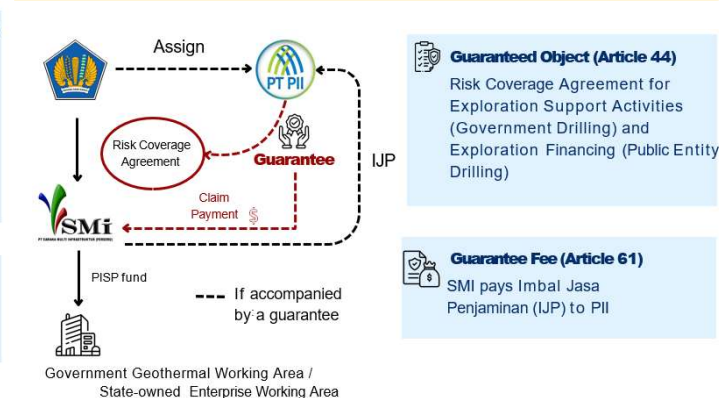
B. Govt Guarantee for Loan and Bond/Sukuk

Government Guarantee for SOE and PT SMI as Country Platform Manager in energy transition;



C. De-risking for Geothermal Exploration Support

Government Guarantee for de-risking facility on Geothermal Development Support.



*) carried out by PII or PII with the Minister of Finance



Government Guarantee Projects – On Going

SOE's Direct Lending for Infrastructure Development with Govt Guarantee (PMK 189/2015 & PMK 101/2018)

No	Lender	Program / Project	Loan	Purpose
1.	World Bank	Indonesia Electricity Network and Transmission ((I—ENET) - PforR	USD 500 million	Increase delivery, reliability of and sustainability of electricity services in the Java, Madura and Bali Region
2.	World Bank	Indonesia Least-Cost Sustainable Electricity (ISLE) 2 – PforR	USD 600 million.	Increase access to sustainable and lower-cost electricity in Kalimantan and Sumatra Regions.
3.	ADB	Result Based Loan Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition (RBL-AICET) Phase-1	USD 500 million (There is possibility to upsize into USD860 million)	renewable energy generation capacity increase program and other supporting activities

SOE's Financing for Renewable Energy Development with Govt Guarantee (PMK 5/2025)

No	Lender	Program / Project	Loan	Purpose
1.	KfW	Green Energy Corridor Sulawesi (GECS)	USD 300 million	Enhance green electricity infrastructure in Sulawesi
2.	ADB	Additional Loan Dieng Patuha 2	USD 180 million	Cost Overrun Financing



Dukungan untuk Pengembangan Energi Panas Bumi



Government Guarantee Projects – On Going



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direct Lending with Government Guarantee

<i>Legal</i>	PMK 189/2015
<i>Fitures</i>	Credit guarantee to SOE for infrastructure development
<i>Beneficiary</i>	SOE
<i>Stage</i>	Exploitation
<i>Risk Coverage</i>	Credit Risk
<i>Case</i>	Loan ADB to PT GDE (USD 330 jt) Exploitation Project D2P2

Surat Jaminan Kelayakan Usaha (BVGL)

<i>Legal</i>	PMK 130/2016
<i>Fiture</i>	Government guarantee for PLN financial obligation in PPA
<i>Beneficiary</i>	SOE and Private
<i>Stage</i>	Exploitation
<i>Risk Coverage</i>	Political Risk
<i>Case</i>	PLTP Muara Laboh, PLTP Sarula, PLTP Rantau Dadap, PLTP Wampu, PLTP Semangka, PLTP Hasang.



PISP Fund

<i>Legal</i>	PMK 80/2022
<i>Fiture</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Exploration Support (<i>Govt Drilling</i>) ✓ Exploration Financing <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>SOE Drilling</i> ▪ <i>Private Drilling</i>
<i>Beneficiary</i>	Govt, SOE, and Private
<i>Stage</i>	Exploration
<i>Risk Coverage</i>	Exploration risk, political risk
<i>Case</i>	Wae Sano, Jailolo, etc

Financing facility with derisking that only provided for geothermal development

Subsidiary Loan Agreement (SLA)

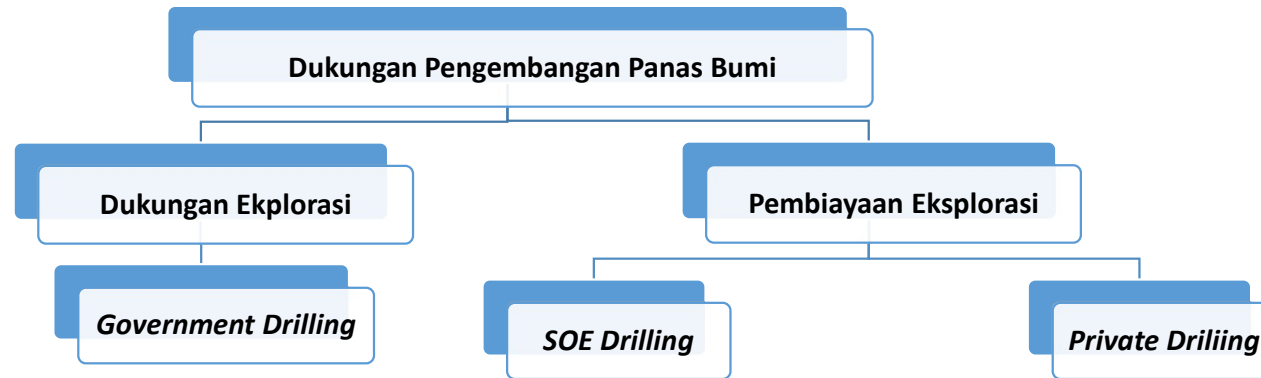
<i>Legal</i>	PMK 108/2016 & PMK 108/2019
<i>Fiture</i>	Soft funding from multilateral and bilateral
<i>Beneficiary</i>	SOE
<i>Stage</i>	Exploitation
<i>Case</i>	SLA from JICA to PT PLN (JPY 30 Billion): PLTP Lahendong, PLTP Ulubelu, Engineering Service Tulehu, Engineering Service Hululais.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Fasilitas Dana PISP Untuk Dukungan Pengembangan Panas Bumi (1)

PMK 80/2022 tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana PISP Pada PT SMI



	Dukungan Ekplorasi (Government Drilling)	Pembiayaan Ekplorasi BUMN (SOE Drilling / Public Window)	Pembiayaan Ekplorasi Swasta (Private Drilling / Private Window)
Cakupan	Penyediaan dana untuk kegiatan eksplorasi panas bumi pada wilayah milik Pemerintah, dengan penanggungungan risiko eksplorasi (<i>derisking</i>) 100%	Penyediaan pembiayaan eksplorasi pada wilayah milik BUMN dan swasta dengan penanggungungan risiko eksplorasi maks 50% dari total pembiayaan	
Penerima manfaat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian ESDM ▪ BU Penerima Manfaat Dukungan Ekplorasi (Pemenang Lelang pasca eksplorasi) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BUMN ▪ Badan usaha mayoritas dimiliki BUMN 	Swasta
Instrumen	<i>Expense/Reimbursable Cost</i>	<i>Loan (Non Komersial) + Grant (applicable due to risk event)</i>	
Sumber derisking	<i>Risk Sharing Dengan Pemerintah (APBN)</i>		<i>GREM Financial Instrument (grant)</i>
Skema fasilitas	Penugasan Khusus kepada PT SMI dan PT GDE	Penugasan Khusus kepada PT SMI	
Fund manager	PT SMI		
Pelaksana	PT GDE	BUMN pemilik WKP	Swasta pemilik WKP
Co Finance	Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP) - hibah WB	Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) - pinjaman WB	Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) - pinjaman & hibah WB



Progres dan Pipeline Project Dana PISP



Pembiayaan Eksploitasi

1 Proyek PLTP

Proyek Small Scale Dieng (tahun 2019)

Kapasitas: 10 MW

Pengembang: PT Geo Dipa Energi

Total pinjaman: **\$ 18 juta**
(fully disbursed)



Catatan :

Berdasarkan PMK 62/2017, Dana PISP dapat digunakan untuk pembiayaan fase eksploitasi menggunakan skema B to B. Namun sesuai PMK 80/2022, Dana PISP difokuskan hanya untuk pembiayaan di fase eksplorasi, mengingat di fase eksploitasi tersedia opsi pembiayaan yang lebih luas karena sudah tidak adanya risiko eksplorasi, misal : pinjaman komersial, *direct lending* dg penjaminan, SLA, dll.

Dukungan Eksplorasi dan Pembiayaan Eksplorasi

Dukungan Eksplorasi (Government Drilling) (2 Proyek Penugasan):

- **Jailolo, Maluku Utara**
 - Menggunakan Dana GEUDP + PISP;
 - Dalam tahap drilling procurement ;
 - Target Drilling Q4 2025.

- **Wae Sano, Flores NTT**
 - Menggunakan Dana PISP Murni.
 - PT SMI dan PT GDE sedang melakukan Penyesuaian RAB dan Drilling Strategy.
 - Target Drilling 2026.

SOE Drilling (assessment oleh PT SMI):

- Candradimuka, Jateng, PT GDE
- Cimanggu, Jabar, PT GDE
- Candi Umbul Telomoyo, Jateng, PT GDE

Private Drilling (preliminary assessment oleh PT SMI):

- Wapsalit, Maluku, Ormat
- Klabat Wineru, Sulut, Ormat
- Hu'u Daha, NTB, STM

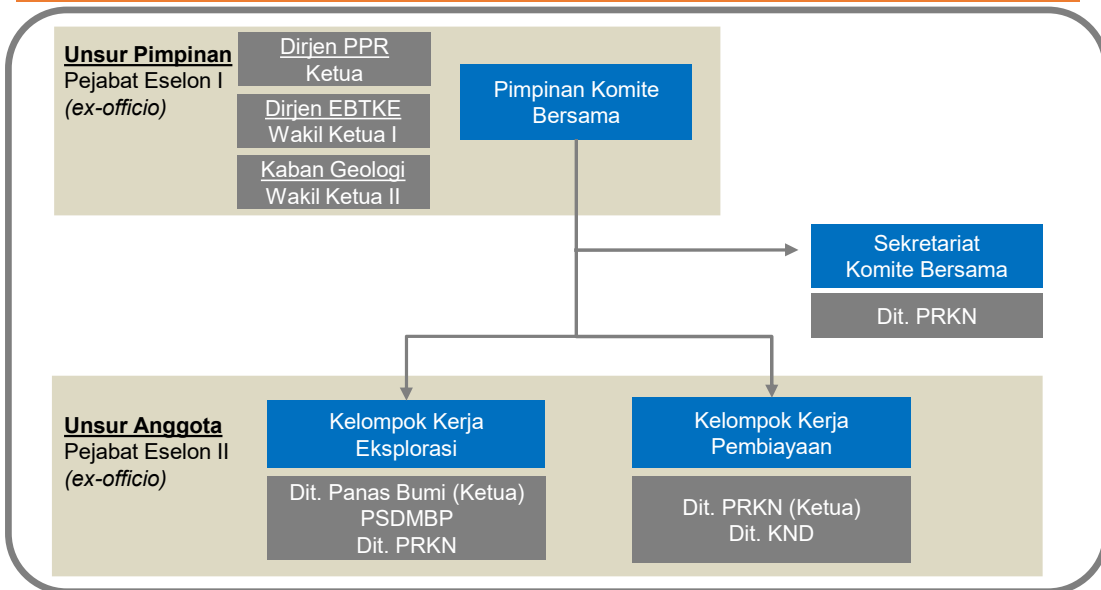


Komite Bersama Dukungan Pengembangan Panas Bumi

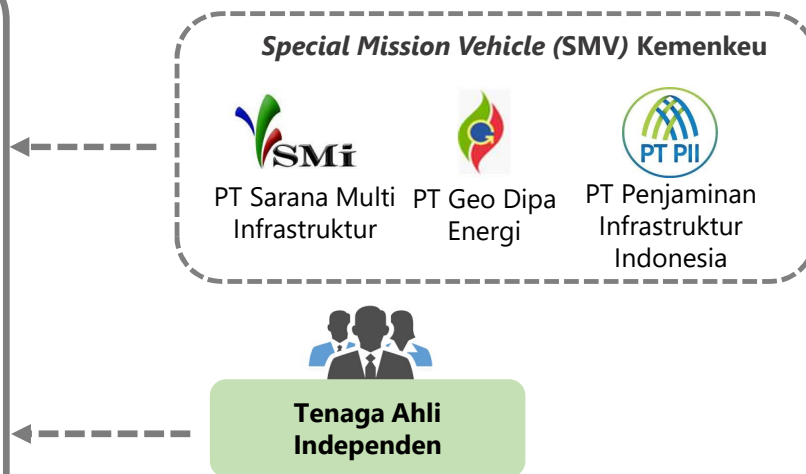


- a. Forum Lintas *stakeholders* sebagai media koordinasi, supervisi, dan pengambilan keputusan strategis;
- b. Dasar Hukum: **KMK 827/2017** dan direvisi dengan **KMK 487/2022**;
- c. Beranggotakan **Kementerian Keuangan (DJPPR dan DJKN)** dan **Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE dan Badan Geologi)**.

Struktur Utama



Supporting Unit



- **Pimpinan Komite Bersama** menetapkan keputusan dan persetujuan dalam rangka pelaksanaan Dukungan Pengembangan Panas Bumi.
- **Sekretariat Komite Bersama** membantu Komite Bersama untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- **Kelompok Kerja** membantu Komite Bersama untuk membahas dan menyelesaikan isu strategis yang bersifat teknis dan melakukan evaluasi serta pemantauan.

- **SMV Kemenkeu** ditugaskan oleh Kemenkeu mengimplementasikan dukungan pengembangan panas bumi.
- **Tenaga Ahli Independen** memberikan masukan (*second opinion*) untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Bersama.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Thank You



Overview Jaminan & Dukungan Pemerintah

Bentuk	Penjaminan Kredit							Jaminan Kelayakan Usaha	Penjaminan Program PEN			Support Pembiayaan Geothermal (PISP)	PKE	
Definisi	Dukungan pemerintah berupa penjaminan kredit untuk pinjaman dan/atau obligasi BUMN dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur atau program pemerintah lainnya							Penjaminan pemerintah untuk memastikan kemampuan BUMN memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat	Jaminan untuk program pemulihan ekonomi nasional: <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah telah memberikan dukungan berupa penjaminan kredit kepada PT. Jamkrindo dan PT Askrindo untuk menjamin kredit modal kerja bagi UMKM melalui LPS. Pemerintah telah memberikan penjaminan loss limit kepada PT PII untuk mendukung loss limit PT PII untuk penjaminan modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Pemerintah bersama dengan PT PII telah menjamin pinjaman/obligasi BUMN yang ditugaskan yang terkena dampak pandemi Covid-19. 			Kerangka pendanaan tersebut secara khusus didirikan oleh Menteri Keuangan sebagai sarana untuk mendukung penyediaan infrastruktur sektor panas bumi.		Dukungan pemerintah kepada eksportir/pembeli melalui LPEI untuk mendukung kebijakan atau program ekspor nasional.
Stake holders	PDAM	BUMN Pangan	PT PLN, PT GDE, PT ITDC	PT SMI	PT HK	PT KAI	PT PLN	Jaminan kelayakan usaha untuk PT PLN	Jaminan kredit modal kerja untuk perusahaan private sector	Jaminan kredit modal kerja untuk UMKM	Jaminan kredit modal kerja untuk BUMN	PT GDE	LPEI	
Sektor	Air	Pangan	Infrastruktur	Jalan Tol	Transp ortasi	Listrik		Program PEN			Listrik	Sektor Berorientasi Expor		
Nilai	Rp202,8 T							Rp158,4 T	Rp99,3 T			Rp8,8 T	Rp8,7 T	



Government Guarantee Pipeline Projects – 2025/2026



KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Lender	Program / Project	Financing Needs	Guarantee Est	Purpose
1.	AFD	Result Based Loan Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition (RBLAICET) Phase-1	USD 301 million	USD 301 million	renewable energy generation capacity increase program and other supporting activities
2.	KfW	Result Based Loan Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition (RBLAICET) Phase-1	USD 302 million	USD 302 million	renewable energy generation capacity increase program and other supporting activities
3.	ADB	CIF Accelerating Coal Transition (ACT): Indonesia Country Investment Plan (IP) SOE: PT SMI	Source Amount (US \$ million) ADB: 102, CIF: 99, Other / Private: 150, Government of Indonesia 500. Total USD 851 million	USD 851 million	to support developing countries that are heavily reliant on coal to accelerate the transition away from coal to renewable energy (RE) while ensuring a holistic, integrated, socially inclusive, and gender-equal transition.
4.	World Bank	Indonesia Green Financing Facility (GreFi)	USD 310 million	USD 310 million	to improve PLN's capacity to raise Green and Sustainability-Linked Finance from commercial markets to accelerate Indonesia's energy transition.
5.	AIIB	Result Based Program Sumatera	USD 500 million	USD 500 million	Increase access and lower-cost electricity in Sumatra Regions.



Jaminan Pemerintah Atas Pinjaman PT PLN (Persero)

Penjaminan Proyek FTP 1

36 Surat Jaminan Pemerintah telah diterbitkan untuk pendanaan proyek PLTU dan transmisi FTP 1.

Proyek telah beroperasi sebanyak 30 PLTU dengan total kapasitas 9.722 MW dari target 9.897 MW.

Sampai dengan Triwulan II 2025, terdapat 34 dari 36 Perjanjian Kredit/ Perjanjian Kredit Sindikasi (PK/PKS) yang telah dinyatakan lunas. Sisa 2 PK/PKS dijadwalkan seluruhnya selesai sampai dengan tahun 2025.

Penjaminan Proyek FTP 2

10 Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) telah diterbitkan untuk proyek FTP-2 (2 PLTU, 5 PLTP, 3 PLTA)

3 SJKU telah dinyatakan berakhir karena tidak mampu mencapai *financial close*.

Terdapat 7 SJKU yang masih aktif dengan rincian:

- 5 proyek sudah beroperasi sepenuhnya;
- 2 proyek baru beroperasi sebagian dan masih dalam tahap konstruksi untuk unit lainnya

Penjaminan Proyek 35 GW

Jaminan Kelayakan Usaha diberikan untuk 2 proyek PLTU IPP Jawa 1 & 4

Jaminan Kredit diterbitkan untuk:

18 proyek transmisi dan gardu induk Jawa Bagian Tengah
11 Proyek pada paket PLTU dan PLTMG Tahap 1
4 Proyek pada paket PLTU dan PLTMG Tahap 2
1 Proyek (PLTU Timor-1) pada PLTU dan PLTMG Tahap 3

Dari total 36 Proyek, progres fisik 8 proyek di antaranya masih dalam tahap konstruksi.

Penjaminan *Direct Lending*

9 Jaminan *Direct Lending* telah diterbitkan untuk pembiayaan proyek PLN

5 Pinjaman Langsung menggunakan skema *Result Based Loan* untuk membiayai investasi jaringan transmisi dan distribusi.

Skema *Result Based Loan* menggunakan PLN dan *country system* untuk procurement, financial management dll, tidak tunduk kepada lender system.



Output Penjaminan dan Dukungan Pemerintah

Output yang dicapai

Penjaminan Infrastruktur

Sektor Ketenagalistrikan

- FTP I, kapasitas 9.722 MW
- FTP II, kapasitas 750 MW (Penjaminan Investasi)
- Program Percepatan: Kapasitas PLTU/PLTMG 2.435 MW dan pembangunan transmisi
- Pembangunan Pembangkit EBT dan Penguatan Transmisi-Distribusi Kelistrikan di berbagai wilayah Indonesia dgn skema *Result Based Loan dan Program For Result* (Direct Lending)
- PLTP 2x55 MW (Direct Lending)

Sektor Jalan Tol

TTS 596 km, (6 ruas jalan beroperasi penuh dan 4 ruas jalan beroperasi sebagian)

Sektor Pariwisata

Pembangunan infrastruktur Kawasan Pariwisata Mandalika (Direct Lending)

Sektor Infrastruktur Air Minum

PDAM di 10 wilayah: Bogor, Ciamis, Lombok Timur, Malang, Bandarmasih, Banyumas, Cilacap, Giri Menang, Denpasar, Palopo

Infrastruktur Daerah

Pembangunan:

- 3 Pasar
- 10 Rumah Sakit,
- 19 ruas jalan,
- 1 fasilitas PDAM

Sektor Transportasi

Penjaminan atas Pinjaman PT KAI untuk:

1. Proyek LRT Jabodebek
2. Cost overrun proyek KCJB

Dukungan Lain

Penjaminan Kredit Ekspor

1. PKE UKM Berorientasi Ekspor
2. PKE Trade Finance
3. PKE Alat Transportasi
4. PKE Kawasan Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan
5. PKE Destinasi Super Prioritas
6. PKE KEK Mandalika

Penjaminan PEN

UMKM

- Penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) yang dijamin: Rp65,74 T
- Jumlah debitur: : 3.215.684 Pelaku Usaha di 19 sektor ekonomi

Korporasi

- Penyaluran Kredit Modal Kerja yang dijamin: Rp7,36 T
- Jumlah debitur: : 76 Pelaku Usaha di 20 sektor ekonomi

BUMN

- Nilai Kredit yang dijamin: Rp63,30 T
- Jumlah transaksi: 8 (delapan)
- BUMN terjamin: Waskita, Pertamina, PT LEN, PT INKA, Perum Damri

PISP

- *Government drilling*: Wae Seno, Jailolo,
- *SOE Drilling*: Cimanggu.